



Penyelenggara Pelayanan Publik Disasar IKD

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta mengajak penyelenggara pelayanan publik untuk menerapkan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Implementasi IKD di instansi-instansi pelayanan publik selain memudahkan, juga diharapkan dapat meningkatkan capaian aktivasi atau penggunaan IKD oleh masyarakat.

Secara nasional target aktivasi IKD di kabupaten kota sekitar 30 persen dari warga yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik. Adapun di Kota Yogyakarta, sebanyak 13.242 atau sekitar 5 persen masyarakat telah melakukan aktivasi IKD hingga bulan ini.

Penjabat Wali Kota Yogyakarta Sugeng Purwanto mengatakan, dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan adalah data dari Kementerian Dalam Negeri pada Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Dalam sosialisasi itu Sugeng menekankan satu data kependudukan untuk semua keperluan.

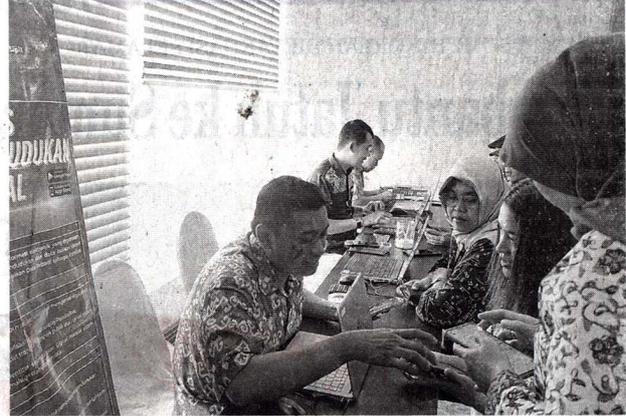
"Maka mau tidak mau, suka tidak suka kita harus menyesuaikan di era digitalisasi dan berkomitmen apapun standar pelayanan administrasi kependudukan, salah satunya adminduk sekarang juga digital," kata Sugeng saat sosialisasi adminduk di Hotel Kimaya, Selasa (10/9).

Sugeng menyatakan, Pemkot Yogyakarta telah berupaya untuk memanfaatkan data kependudukan dalam

berbagai kepentingan dan sektor. Oleh karena itu semua institusi pemerintah, lembaga maupun swasta dalam tugas pokok fungsi pelayanan pada masyarakat dihadirkan untuk menerima sosialisasi seperti BPJS, Polri, KPU, Kemenkes, hingga perbankan. Pihaknya mengapresiasi kehadiran para penyelenggara pelayanan publik dalam sosialisasi adminduk itu. "Semuanya akan berkepentingan dengan adminduk. Baik secara personal untuk pengajuan pelayanan maupun secara kolektif kelembagaan untuk memberikan pelayanan," paparnya.

Sugeng menyebut mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 tentang Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah membuka jalan untuk lebih efisien dalam mengelola data kependudukan. IKD memungkinkan warga untuk memiliki dokumen kependudukan dalam format digital. Dengan IKD warga memiliki dokumen kependudukan dalam format digital yang dapat diakses melalui gawai. "Jadi betul-betul sekarang semua pelayanan digital," tambah Sugeng.

Menurut Kepala Dindikcapil Kota Yogyakarta Septi Sri Rejeki, penggunaan



Petugas Dindikcapil Kota Yogyakarta memberikan layanan aktivasi IKD kepada peserta sosialisasi adminduk terkait IKD.

identitas melalui IKD di instansi pelayanan publik masih ada yang menerima dan menolak. Oleh sebab itu diadakan sosialisasi adminduk terkait IKD untuk menegaskan pentingnya pemanfaatan data kependudukan dan IKD oleh penyelenggara pelayanan publik. Termasuk pentingnya aktivasi IKD dan menegaskan IKD merupakan dokumen adminduk yang sah untuk semua keperluan pelayanan publik sebagaimana dokumen

adminduk yang fisik.

"Sosialisasi ini salah satu tujuannya menegaskan bahwa IKD saatnya sudah diimplementasikan di seluruh instansi pelayanan publik. Kesehatan, stasiun dan bandara sudah menerapkan IKD. Tapi di perbankan belum semua mengimplementasikan IKD, sehingga sosialisasi ini setelahnya bisa diimplementasikan di seluruh layanan publik di Kota Yogyakarta," terang Septi. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005